

BAB II

MUSLIM INDIA DAN KONTROVERSI KEBIJAKAN CAA (*CITIZENSHIP AMENDMENT ACT*) 2019

Bab ini secara khusus membahas Citizenship Amendment Act (CAA) 2019 di India beserta kontroversi yang melingkupinya. Sebagai salah satu kebijakan paling kontroversial dalam sejarah demokrasi India, CAA tidak hanya dipandang sebagai isu hukum kewarganegaraan, tetapi juga sebagai kebijakan yang menyentuh aspek sosial, politik, dan identitas kebangsaan. Pembahasan bab ini akan diawali dengan kajian mengenai latar belakang lahirnya CAA, termasuk dinamika historis regulasi kewarganegaraan di India dan perbedaan mendasar antara Citizenship Amendment Bill (CAB) 2016 dengan CAA 2019 yang akhirnya disahkan. Bagian ini penting untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut dibingkai oleh pemerintah sebagai solusi bagi pengungsi non-Muslim dari negara tetangga, namun sekaligus memunculkan pertanyaan serius terkait eksklusi umat Muslim. Selanjutnya, bab ini akan menguraikan gambaran umum kondisi masyarakat Muslim India. CAA 2019 memberi legitimasi politik dan hukum terhadap narasi eksklusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hak-hak dasar masyarakat Muslim di bidang sosial, ekonomi, maupun kewarganegaraan. Terakhir, bab ini akan membahas berbagai respon terhadap CAA 2019, baik dari pihak yang mendukung maupun yang menolak.

2.1 Latar Belakang Kebijakan *Citizenship Amendment Act (CAA) 2019*

India merupakan sebuah negara besar yang memiliki etnis, bahasa, serta agama yang sangat beragam. Sejak kemerdekaannya India telah mengalami permasalahan pengelolaan migrasi dan kewarganegaraan. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, perubahan demografi serta politik di India membuat kebijakan migrasi dan kewarganegaraan India menjadi isu yang sensitif dan kontroversial. Pada tahun 1947 terdapat fenomena pembagian India yang telah menyebabkan terjadinya migrasi besar-besaran di antara India dan Pakistan, dikarenakan adanya konflik agama dan ketidakstabilan politik di negara-negara terlibat. Dalam migrasi ini, banyak dari masyarakat Muslim di India memutuskan untuk berpindah ke negara Pakistan, sedangkan umat Hindu dan Sikh dari Pakistan berpindah ke India. Peristiwa migrasi ini menjadi salah satu alasan penting pemerintah India membentuk kebijakan CAA 2019 sebagai bentuk respon dalam mengatasi permasalahan tersebut.⁴¹

Pemerintah India telah menerima banyak imigran, hingga pada tahun 2014 negara sekuler ini membutuhkan sebuah penanganan yang pada akhirnya mendapatkan solusi dengan cara melakukan atau memberikan naturalisasi kepada imigran melalui pembentukan dan pengesahan kebijakan CAA 2019.⁴² CAA merupakan undang-undang untuk memberikan perlindungan terhadap minoritas dari negara lain dengan cara membukakan jalan untuk membentuk

⁴¹ Tezafiany Razqia, M, *Op. Cit.*

⁴² Anggit Lestari, A., Syaprin Zahidi, M., & Agoes Aufiya, M, *Op. Cit.*

kewarganegaraan India bagi imigran dari negara Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh yang beragama Hindu, Budha, Buddha, Jain, Sikh, Parsi, dan Kristen yang telah memasuki India pada atau sebelum 31 Desember 2014.

Melalui undang-undang tersebut, pemerintah India juga akan memberikan keringanan tempat tinggal di India untuk mendapatkan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi dari 11 tahun menjadi 5 tahun bagi imigran yang tercantum. Namun sayang, keringanan dari undang-undang tersebut tidak diperuntukkan kepada masyarakat Muslim yang berasal dari Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh. Tidak adanya pencantuman agama Islam dalam undang-undang tersebut dapat dimaknai bahwa CAA tidak menawarkan serta memberikan perlindungan dan keringanan yang setara terhadap para imigran Muslim.⁴³

Kebijakan CAA 2019 merupakan sebuah kebijakan yang terbentuk dari hasil amandemen kebijakan CAA 1955 dan disahkan oleh pemerintah India pada tahun 2019. Kebijakan ini dibuat untuk mengatur tentang permasalahan status kewarganegaraan bagi para pengungsi dari negara-negara tetangga di India. Kebijakan ini dapat memberikan akses atau jalur yang lebih mudah bagi pengungsi beragama Hindu, Sikh, Buddha, Parsi, Jain, dan Kristen dari Bangladesh, Afghanistan, dan Pakistan yang mengalami penganiayaan agama untuk mendapatkan status kewarganegaraan India.

⁴³ Semarang, U. S. (n.d.). *Demonstrasi Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019-2020 | P2K Universitas STEKOM*.
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Demonstrasi_Undang-Undang_Kewarganegaraan_India_2019-2020#cite_note-128.

Saat mengesahkan kebijakan CAA 2019, pemerintah India menyatakan dengan resmi mengenai tujuan daripada kebijakan baru ini. Tujuan utama daripada pembentukan dan pengesahan kebijakan CAA ini adalah untuk memberikan perlindungan dan keamanan secara khusus kepada para minoritas beragama non-Muslim, yakni Hindu, Buddha, Jain, Sikh, Parsi dan Kristen, yang mengalami tindakan kekerasan atau penganiayaan di negara Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan. Mereka enam kelompok agama minoritas di Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan tersebut, bisa mendapatkan perlindungan dengan cara mendapatkan status kewarganegaraan di India melalui kebijakan CAA.⁴⁴

Selain untuk memberikan perlindungan kepada kelompok tertentu, melalui kebijakan ini, pemerintah India juga memiliki tujuan untuk memperoleh dan meningkatkan simpati serta dukungan politik dari kelompok-kelompok tertentu di India, seperti kelompok Hindu dan masyarakat yang relevan dan sepakat dengan pandangan nasionalisme Hindu serta memberikan keistimewaan terhadap kelompok Hindu. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mendapatkan dukungan masyarakat sehingga politik pemerintah menjadi lebih kuat, dan bisa membuka peluang kemenangan yang lebih besar dalam konteks pemilihan umum yang melibatkan suara masyarakat.⁴⁵

⁴⁴ Tezafiany Razqia, M, *Op. Cit.*

⁴⁵ Semarang, U. S. (n.d.), *Op.Cit.*

2.1.1 Perbandingan *Citizenship Amendment Bill (CAB) 2016* dan *Citizenship Amendment Act (CAA) 2019*

Kebijakan CAA 1955 merupakan kebijakan awal yang mengatur perihal perolehan status kewarganegaraan India berdasarkan tujuan masing-masing individu, yang dimana para migran tidak bisa memperoleh status kewarganegaraan India, dan para imigran tidak serta merta memperoleh status kewarganegaraan India. Pada kebijakan ini, individu atau masyarakat yang bisa mendapatkan status kewarganegaraan India adalah para warga atau masyarakat yang telah lahir di India atau memiliki garis keturunan India, serta para imigran yang berasal dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan.⁴⁶

Sebelum Kebijakan CAA 1955 diamandemen menjadi CAA 2019, dalam proses amandemen ini terdapat rancangan amandemen kebijakan pada tahun 2016. CAB 2016 diperkenalkan sebagai rancangan dalam mengamandemen CAA 1955, yang dimana setelah ini dilakukan rujukan ke Komite Gabungan Parlemen.⁴⁷ Hasil laporan dari rujukan tersebut diserahkan pada tanggal 7 Januari 2019, dan disahkan pada bulan Desember 2019 di Lok Sabha. Dan berikut ini kita lihat perbandingan dari CAB 2016 dan CAA 2019 yang telah disahkan:

⁴⁶ Nasrah Asyari, N. W, *Op. Cit.*

⁴⁷ *Ibid.*

Tabel 2.1 Perbandingan CAB 2016 dan CAA 2019

CAB 2016	CAA 2019
<ul style="list-style-type: none"> ● Status kewarganegaraan bagi migran ilegal tertentu: Melarang perolehan kewarganegaraan India terhadap migran ilegal. Migran ilegal merupakan warga asing yang memasuki India tanpa menggunakan paspor maupun dokumen perjalanan yang sah atau <i>overstay</i>. ● Menetapkan bahwa umat Hindu, Buddha, Sikh, Jain, Parsi dan Kristen yang berasal dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan, tidak akan diperlakukan sebagai migran ilegal. Untuk mendapatkan keistimewaan ini, mereka tersebut harus dibebaskan dari 	<ul style="list-style-type: none"> ● Menambahkan dua kebijakan kewarganegaraan bagi para migran ilegal dari enam agama dan ketiga negara tersebut. ● Konsekuensi memperoleh status kewarganegaraan: (i) sejak tanggal mereka masuk ke India, orang tersebut akan dianggap sebagai warga negara India, dan (ii) semua proses hukum mereka yang berhubungan dengan migrasi ilegal dan kewarganegaraan mereka akan ditutup. ● Pengecualian: Status kewarganegaraan bagi migran ilegal tidak akan berlaku di wilayah suku Karbi Anglong di Assam, Perbukitan Garo di Meghalaya, Distrik Wilayah di

<p>UU Orang Asing 1946 dan UU Paspor 1920. UU 1946 mengatur tentang masuk dan keluarnya orang asing di India, sedangkan UU 1920 mengatur orang asing untuk membawa paspor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sejak Kebijakan ini disahkan, maka seluruh proses hukum migran ilegal yang tertunda akan ditutup. 	<p>Tripura, dan Distrik Chakma di Mizoram, sebagaimana tercantum dalam Jadwal keeman konstitusi. Selain ini juga tidak berlaku di wilayah bawah izin garis dalam peraturan perbatasan Timur Bengal 1873. Izin Garis Dalam mengatur perihal kunjungan orang India ke Pradesh, Arunachal, Mizoram, dan Nagaland.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perolehan status kewarganegaraan melalui naturalisasi: Mengizinkan setiap individu untuk mengajukan status kewarganegaraan melalui naturalisasi, apabila orang tersebut dapat memenuhi kualifikasi tertentu. Diantaranya adalah telah 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi periode naturalisasi kelompok tersebut dari enam tahun menjadi lima tahun.

<p>tinggal di India atau melakukan dinas di pemerintah pusat selama 12 bulan terakhir dan setidaknya 11 tahun dari 14 tahun sebelumnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengecualian terhadap umat Hindu, Buddha, Sikh, Jain, Parsi dan Kristen dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan. Bahwa terkait dengan kualifikasi ini, persyaratan 11 tahun bagi kelompok yang tersebut akan dikurangi menjadi 6 tahun. 	
--	--

Sumber: PRS Legislative Research. (n.d.).

Berdasarkan tabel diatas, kebijakan CAA 2019 telah menetapkan aturan bahwa migran ilegal yang dapat memenuhi empat syarat tidak akan dianggap dan diperlakukan sebagai migran ilegal. Adapun empat syarat tersebut adalah:

1. Beragama Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi, atau Kristen;
2. Berasal dari Afghanistan, Bangladesh, atau Pakistan;
3. Telah memasuki India pada atau sebelum 31 Desember 2014;

4. Tidak berada di wilayah suku tertentu (Assam, Meghalaya, Mizoram, atau Tripura)⁴⁸

Tidak adanya pencantuman didalam syarat naturalisasi imigran dalam kebijakan CAA inilah yang membuat terjadinya kericuhan dan kontroversi di India.

2.1.2 Kontroversi Kebijakan *Citizenship Amendment Act* (CAA) 2019

Kebijakan *Citizenship Amendment Act* (CAA) 2019 ini menjadi salah satu kebijakan yang penuh dengan kontroversi serta memicu banyak perdebatan di seluruh lapisan masyarakat, dari masyarakat biasa, tokoh nasional, hingga tokoh internasional. Kebanyakan dari masyarakat mempertanyakan dan berdebat mengenai adanya ketentuan kriteria berdasarkan agama di dalam kebijakan ini, yang dimana dapat membatasi status kewarganegaraan kelompok agama tertentu yang tidak tercantum di dalam kebijakan, maka kebijakan ini dianggap telah melanggar prinsip-prinsip sekuler yang merupakan prinsip utama dalam konstitusi pemerintah India.⁴⁹

Pengecualian terhadap kelompok Muslim di dalam kebijakan CAA telah membuat beberapa pihak menyatakan pendapat bahwa kebijakan ini telah melakukan tindakan diskriminasi serta dengan jelas melanggar kesetaraan yang seharusnya dijunjung dan dijamin oleh konstitusi India. Para masyarakat penentang CAA, berargumen bahwa isi dari kebijakan CAA 2019 ini memberikan kemudahan atau keringanan dalam mendapatkan status kewarganegaraan hanya

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Tezafiany Razqia, M. (2023). *Kebijakan Citizenship (Amendment) Act 2019 India: Studi Migrasi Muslim Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan Ke India tahun 2020.*

kepada imigran minoritas dengan status agama non-Muslim, sedangkan imigran Muslim tidak mendapatkan keringanan kebijakan yang serupa. Maka tindakan yang dianggap diskriminatif oleh CAA 2019 ini menciptakan banyak aksi protes yang menuntut untuk mencabut atau mengubah kebijakan CAA.⁵⁰ Hal ini secara jelas melanggar prinsip non diskriminasi dalam hak asasi manusia. Sebagai contoh, Pasal 2 UDHR 1948 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa perbedaan apa pun, termasuk agama, dan Pasal 15 menegaskan hak setiap orang atas suatu kewarganegaraan serta melarang pencabutan kewarganegaraan secara sewenang-wenang.⁵¹

Kebijakan CAA menyebabkan jumlah imigran Muslim yang mencari perlindungan dan keamanan di India semakin menurun.⁵² Perubahan demografis ini bisa mengubah tatanan sosial di negara India seperti mengurangi keragaman budaya dan agama. Dalam konteks sosial, kebijakan CAA telah mengubah dinamika sosial di India yang ada, hal ini dapat kita lihat dengan timbulnya fenomena ketegangan sosial, serta perpecahan sosial di antara kelompok agama yang ada. Selain itu, pada masyarakat Muslim juga berdampak secara langsung, seperti adanya tindakan diskriminasi sosial serta keterbatasan akses dalam hal pendidikan dan layanan publik. Hadirnya imigran Muslim yang mencari perlindungan dan keamanan di India sebelumnya juga turut berkontribusi terhadap perputaran ekonomi di India, seperti dalam hal perdagangan, pekerjaan, dan usaha

⁵⁰ Tezafiany Razqia, M, *Op. Cit.*

⁵¹ Villanueva Ruiz, I., Crespo, M. U., Arvanitis, K., Bompard, M., Omarjee, Y., Kouloglou, S., Palop, E. R., Papadimoulis, D., Georgiou, G., & Kizilyürek, N. (n.d.). *MOTION FOR A RESOLUTION*. Retrieved September 3, 2025, from https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0079_EN.pdf.

⁵² *Ibid.*

mikro. Sehingga menurunnya jumlah imigran Muslim di India yang disebabkan oleh kebijakan baru CAA 2019 ini jelas mempengaruhi perekonomian dan dinamika pasar India pada beberapa sektor.⁵³ Masyarakat Muslim di India juga mengalami adanya pembatasan akses ekonomi, yang sehingga dapat menyebabkan masyarakat Muslim di India mengalami kemiskinan struktural. Dalam konteks politik, kebijakan CAA telah menciptakan adanya marginalisasi politik dan penguatan nasionalisme Hindu atau Hindutva, serta terjadinya penurunan representasi politik Muslim. Keamanan Muslim India juga terancam, akibat dari pengaruh kebijakan CAA 2019, Status kewarganegaraan, tindakan hukum, serta keamanan nasional masyarakat Muslim di India ikut terancam.

Fakta bahwa CAA 2019 mengecualikan imigran Muslim dinilai melanggar prinsip-prinsip tersebut, sehingga tidak hanya bertentangan dengan konstitusi sekuler India, tetapi juga dengan konsep HAM internasional.⁵⁴ Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB bahkan menyebut CAA 2019 sebagai kebijakan yang “*fundamentally discriminatory*” (sangat diskriminatif) dan menyerukan agar perlindungan bagi kelompok rentan diberikan melalui mekanisme suaka yang non-diskriminatif.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Singh, K. (2024). US, UN express concern about India's religion-based citizenship law. <https://www.reuters.com/world/us-un-express-concern-about-indias-religion-based-citizenship-law-2024-03-12>.

⁵⁵ Villanueva Ruiz, I., Crespo, M. U., Arvanitis, K., Bompard, M., Omarjee, Y., Kouloglou, S., Palop, E. R., Papadimoulis, D., Georgiou, G., & Kizilyürek, N. (n.d.). *MOTION FOR A RESOLUTION*. Retrieved September 3, 2025, from https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0079_EN.pdf.

2.2 Gambaran Umum Kondisi Masyarakat Muslim India

India merupakan salah satu negara di Asia Selatan yang termasuk kedalam negara tujuan imigran ke-14 di dunia. Selama ini, India selalu menjadi tujuan populer para migran internasional, pada tahun 2020 India telah mencapainya jumlah migran dengan angka 4,9 juta penduduk dari berbagai negara asal.⁵⁶ Adapun asal dari para migran tersebut sangat beragam, mulai dari China, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, hingga Bangladesh yang menjadi pemasok imigran terbesar di India.⁵⁷

Masyarakat Muslim di India, yang berjumlah sekitar 200 juta jiwa atau 14,2% dari total populasi, merupakan komunitas minoritas terbesar di negara tersebut.⁵⁸ Namun, posisi mereka di bidang sosial, ekonomi, politik, dan keamanan masih menunjukkan pola marginalisasi yang cukup signifikan. Secara sosial, Muslim India menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, baik dalam akses pendidikan maupun layanan publik. Data All India Survey on Higher Education (AISHE) menunjukkan bahwa partisipasi Muslim di perguruan tinggi hanya sekitar 5–6%, jauh di bawah proporsi demografis mereka.⁵⁹ Hal ini diperburuk dengan tingginya angka putus sekolah di kalangan siswa Muslim, terutama di jenjang menengah. Dalam dimensi ekonomi, komunitas Muslim masih terkonsentrasi di sektor informal dengan pendapatan rendah. Periodic Labour

⁵⁶ R. Singh, "Origin of world's largest migrant population, India seeks to leverage immigration," migrationpolicy.org, <https://www.migrationpolicy.org/article/india-migration-country-profile> (accessed May 20, 2025).

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Tezafiany Razqia, M. *Op.Cit.*

⁵⁹ Mehta, A. C. (2023). *The State of Muslim Education in India A Data-Driven Analysis*. <https://educationforallinindia.com/wp-content/uploads/2023/11/the-state-of-muslim-education-in-india-by-ArunCMehta-based-on-UDISEPlus-AISHE-2023.pdf>

Force Survey (PLFS) mencatat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja Muslim cenderung lebih rendah dibanding komunitas mayoritas. Kemiskinan struktural tetap menjadi tantangan, seiring keterbatasan akses terhadap program sosial dan peluang kerja formal.⁶⁰

Dari sisi politik, representasi Muslim di parlemen dan jabatan publik mengalami penurunan dalam beberapa dekade terakhir. Pada Pemilu Lok Sabha 2019 terdapat 27 anggota parlemen Muslim (sekitar 5%), dan jumlah ini menurun menjadi 24 pada 2024.⁶¹ Kesenjangan representasi ini memperlihatkan bahwa suara politik Muslim semakin terpinggirkan, meskipun mereka adalah kelompok minoritas terbesar di India. Sementara itu, dalam aspek keamanan, Muslim India kerap menjadi sasaran kekerasan komunal maupun tindakan represif aparat. Peristiwa kerusuhan Delhi 2020 yang menewaskan lebih dari 50 orang, sebagian besar dari komunitas Muslim, menunjukkan kerentanan serius terhadap keamanan mereka.⁶² Wacana integrasi Citizenship Amendment Act (CAA) dengan National Register of Citizens (NRC) semakin menambah rasa ketidakpastian, karena membuka potensi eksklusi dan ancaman terhadap status kewarganegaraan.⁶³ Dengan demikian, kondisi masyarakat Muslim India dapat dipahami sebagai suatu realitas sosial yang ditandai oleh diskriminasi, kerentanan ekonomi, marginalisasi

⁶⁰ Jha, A., & Kishore, R. (2023, June 30). Muslims are the poorest religious group in India | Latest News India - Hindustan Times. *Hindustan Times*.
<https://www.hindustantimes.com/india-news/muslims-in-india-the-poorest-religious-group-with-high-inequality-and-limited-opportunities-data-analysis-reveals-101688097160955.html>.

⁶¹ Vaishnav, M. & Farooqui, A, *Op. Cit.*

⁶² NAHLA WAHDATAN NASRAH ASYÁRI. (n.d.). *PENGARUH HINDUTVA DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAHAN INDIA TERKAIT PERSOALAN IMIGRAN MUSLIM (STUDI KASUS AMANDEMEN UU KEWARGANEGARAAN TAHUN 2019)*.

⁶³ Bajoria, J. (2023). "Shoot the traitors." In *Human Rights Watch*.
<https://www.hrw.org/report/2020/04/10/shoot-traitors/discrimination-against-muslims-under-indias-new-citizenship-policy>.

politik, dan ketidakamanan hukum. Inilah konteks yang membuat kebijakan CAA 2019 menimbulkan kontroversi besar, karena memperkuat pola eksklusif yang sudah lama mereka alami.

Kebijakan CAA 2019 ini mendapatkan banyak kritikan karena dianggap diskriminatif serta menentang konstitusi India dengan prinsip sekularismenya, karena secara eksplisit mengecualikan masyarakat Muslim.⁶⁴ Penerapan CAA 2019 yang dibersamai dengan NRC berhasil mengkhawatirkan Masyarakat Muslim di India. Sejak terbitnya NRC pada bulan Agustus 2019, sekitar 1,9 juta warga Assam berada dibawah ancaman dan ditahan karena gagal membuktikan kewarganegaraannya. Meskipun NRC ditujukan untuk menyingkirkan para imigran gelap tanpa memandang agama, namun tindakan yang berlangsung di Assam telah mempengaruhi masyarakat Muslim Assam yg berjumlah kurang lebih 34% dari seluruh populasi Assam.⁶⁵

Menurut laporan Human Rights Watch tahun 2020, pengadilan yang dilakukan di Assam tersebut telah mengidentifikasi dan menyatakan bahwa banyak dari orang Muslim di Assam merupakan orang asing karena tidak memiliki cukup dokumen untuk membuktikan kewarganegaraannya.⁶⁶ Praktik penggabungan antara CAA 2019 dengan NRC ini telah dilaporkan sebagai tindakan diskriminatif, dan berisiko terhadap jutaan masyarakat Muslim serta minoritas lainnya yang dikhawatirkan dapat kehilangan status kewarganegaraan

⁶⁴ Singh, K. (2025). Anti-minority hate speech in India rose by 74% in 2024, research group says.

⁶⁵ India, N. T. B. (2021, September 6). India's Anti-Immigrant crackdown has torn apart families and locked up hundreds. 1.9 million people fear they could be next. *TIME*.

⁶⁶ *Ibid.*

dan hak pilih.⁶⁷ Kontroversi-kontroversi CAA 2019 ini menyebabkan semakin meningkatnya fenomena diskriminasi dan ketegangan komunal, yang dimana mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi dan politik keamanan masyarakat Muslim di India.

2.2.1 Meningkatnya Diskriminasi Terhadap Masyarakat Muslim

Masih belum ada data yang menyatakan jumlah atau persentase tentang diskriminasi terhadap masyarakat Muslim di India secara spesifik, namun beberapa laporan dan penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan fenomena atau isu diskriminasi terhadap masyarakat Muslim di India dalam beberapa tahun terakhir ini.⁶⁸ Ada berbagai macam bentuk diskriminasi yang telah diterima oleh masyarakat Muslim India, diantaranya adalah adanya keterbatasan akses dalam hal pekerjaan, pendidikan serta layanan publik, adanya tindakan kekerasan, ujaran kebencian, penghancuran properti masyarakat Muslim India dan tindakan buruk lainnya.

⁶⁷ Bajoria, J. (2023). "Shoot the traitors." In *Human Rights Watch*.

⁶⁸ Fitri, N. A. (2023). *DRAFT SKRIPSI DISKRIMINASI TERHADAP WARGA MUSLIM DI INDIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL TENTANG HAK ASASI MANUSIA*.

Tabel 2.2 Data Peristiwa Ujaran Kebencian Terhadap Minoritas Muslim di India

No.	Tahun	Jumlah Laporan
1.	2023 (Paruh Pertama)	255 kasus
2.	2023 (Paruh Kedua)	413 kasus
3.	2024	1.050 kasus

Sumber: India Hate Lab (IHL). (2024, June 15). Reports - India Hate Lab (IHL).

Berdasarkan tabel diatas, India Hate Lab telah merangkum sebuah data mengenai jumlah kasus-kasus ujaran kebencian yang dilakukan Masyarakat India terhadap para minoritas seperti Kristen dan Muslim. Berdasarkan data diatas, dimulai dari pada tahun 2023 paruh pertama, terdapat sekitar 255 ujaran kebencian yang telah dilontarkan terhadap kaum Muslim. Dilanjutkan pada paruh kedua dalam tahun yang sama, ujaran kebencian terhadap minoritas di India meningkat 62% dengan jumlah 413, sehingga disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 668 ujaran kebencian terhadap umat Muslim di India.⁶⁹ Selanjutnya pada laporan terakhir, pada tahun 2024 kasus ujaran kebencian terhadap Muslim kembali semakin meningkat dengan persentase 74% dengan jumlah 1.050 kasus.⁷⁰

Narendra Modi yang menjabat sebagai perdana menteri India pada tahun 2014, juga mendapatkan laporan tuduhan terhadap dirinya. Kelompok hak asasi manusia melaporkan Narendra Modi dengan tuduhan adanya perilaku buruk

⁶⁹ Singh, K. (2024). Anti-Muslim hate speech soars in India, research group says.

⁷⁰ Singh, K. (2025). Anti-minority hate speech in India rose by 74% in 2024, research group says.

terhadap umat Muslim.⁷¹ Selain itu, pada bulan Agustus 2019, Pemerintah India juga melakukan pencabutan status khusus terhadap Kashmir yang merupakan wilayah dengan mayoritas Muslim. Amit Shah sebagai Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa “Seluruh konstitusi akan berlaku untuk Jammu dan Kashmir.”⁷² Tahun 2022 terdapat fenomena penghancuran properti umat Muslim serta pembatasan penggunaan jilbab terhadap siswi di ruang kelas.⁷³ Perdana Menteri Narendra Modi memilih untuk menutup mata dan tetap fokus melanjutkan aksinya dalam mencapai tujuan partainya, tidak peduli dengan konstitusi India yang jelas melarang adanya tindakan diskriminasi atas dasar agama.

2.2.2 Kekerasan Komunal

Selain terjadi peningkatan diskriminasi, pengesahan CAA 2019 yang menyebabkan adanya banyak kecaman dan protes nasional maupun internasional ini juga berdampak terhadap ketegangan sosial dan timbulnya kasus-kasus kekerasan komunal di wilayah India. Dalam fenomena aksi para penolak CAA terdapat kekerasan serta intimidasi yang dibuktikan dengan terdapatnya warga sipil dengan identitas nama Muhammad Raees yang menjadi korban dari penembakan oleh aparat India, padahal beliau bukanlah golongan dari para demonstran melainkan hanya seorang pedagang di pinggir jalan.⁷⁴ Pada Februari 2020 terjadi sebuah kerusuhan dari aksi protes besar di ibu kota India Delhi.⁷⁵

⁷¹ Singh, K. (2024). US, UN express concern about India’s religion-based citizenship law.

⁷² Kalra, A., Miglani, S., and Ismail, D.. (2019). India scraps special for Kashmir in step Pakistan calls illegal.

⁷³ Sharma, S. (2022). India’s hijab dispute reaches its most populous state.

⁷⁴ NAHLA WAHDATAN NASRAH ASYÁRI, *Op. Cit.*

⁷⁵ *Ibid.*

Pada mulanya, aksi tersebut dimulai dengan protes damai terhadap CAA, namun adanya provokasi-provokasi dari berbagai pihak dengan politik yang berseberangan berhasil membuat situasi menjadi panas. sehingga tidak lama kemudian, aksi protes menjadi aksi kekerasan, sementara laporan menyatakan bahwa aparat keamanan gagal merespon dan mengendalikan situasi dengan cepat dan adil.

Setidaknya dalam aksi protes CAA yang berlangsung selama 3 hari tersebut telah menewaskan sekitar 52 orang dan lebih dari 200 orang mengalami luka, serta ratusan rumah, masjid, toko, kendaraan, dan properti-properti lainnya hancur dibakar akibat terjadinya kekerasan komunal tersebut. Beberapa saksi mengungkapkan kesaksiannya bahwa aparat keamanan sengaja bersifat pasif dan membiarkan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. selain itu juga terdapat sebuah rekaman video dari India yang dimana dalam rekaman tersebut menampilkan adanya 5 pria yang sedang dipukuli oleh aparat polisi dan dipaksa untuk menyanyikan lagu kebangsaan India dalam posisi tergeletak dengan luka parah, dua hari kemudian salah satu pria tersebut yang bernama Faizan dengan usia 23 tahun meninggal setelah menerima luka-luka tersebut. Seorang polisi dan sejumlah umat Hindu juga tewas menjadi korban, namun sebagian korban dari kekerasan ini adalah masyarakat Muslim.⁷⁶

Berbagai peristiwa-peristiwa yang telah dialami oleh masyarakat Muslim, pemerintah India tidak kunjung mengambil tindakan atau memberikan solusi

⁷⁶ Bajoria, J. (2023b). "Shoot the traitors." In *Human Rights Watch*. <https://www.hrw.org/report/2020/04/10/shoot-traitors/discrimination-against-muslims-under-indias-new-citizenship-policy>

terhadap masalah tersebut.⁷⁷ Bukannya menyelesaikan konflik yang dialami masyarakat Muslim, pemerintah India malah melakukan penghapusan terhadap pasal 370 tentang status Kashmir dan pasal 35A tentang status Assam, sekaligus menetapkan CAA 2019. Maka dari berbagai fenomena-fenomena yang sudah terjadi ini, tidak dapat kita elak bahwa masyarakat Muslim di India telah sering menerima tindakan kekerasan baik verbal maupun non verbal secara terus menerus, yang dimana jika kondisi seperti ini dibiarkan secara terus menerus akan dapat semakin memperparah konflik domestik yang ada, serta tidak luput juga dapat meningkatkan tindakan diskriminasi serta ketegangan antara masyarakat Hindu dan masyarakat Muslim di India.

2.3 Respon Publik Terhadap *Citizenship Amendment Act (CAA) 2019*

Bab ini akan menguraikan secara mendalam mengenai respon publik terhadap pengesahan Citizenship Amendment Act (CAA) 2019 di India. Kebijakan tersebut tidak hanya memunculkan perdebatan di tingkat pemerintah dan lembaga hukum, tetapi juga menimbulkan reaksi yang sangat beragam dari masyarakat, baik dari kelompok yang mendukung maupun yang menentang.

2.3.1 Respon Penentang *Citizenship Amendment Act (CAA) 2019*

Penindasan terhadap para imigran dengan menyangkut pautkan agama yang telah dilakukan oleh pemerintah India melalui kebijakan barunya ini menuai banyak kontroversi dan kecaman dari masyarakat India, bahkan masyarakat

⁷⁷ Anggit Lestari, A., Syaprin Zahidi, M., & Agoes Afiya, M. (2023). *Polarisasi Penguatan Nasionalisme Hindu di India Dalam Kebijakan Citizenship Amendment Act (CAA) 2019*. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i4.2963>

internasional karena dianggap sudah berlaku tidak adil kepada masyarakat non-Hindu. Sehingga mereka menuntut keadilan atas kebijakan CAA yang terlihat lebih memprioritaskan satu golongan yaitu umat Hindu. Karena berkebalikan dengan tujuan sebuah kebijakan dibuat yang seharusnya mengutamakan kepentingan, kebutuhan dan keadilan bagi seluruh masyarakat yang berada di dalam negara tersebut tanpa terkecuali. Jadi dapat dikatakan bahwa meskipun bukan warga asli, migran maupun imigran tetap mempunyai hak untuk hidup dengan layak, dan tidak boleh didiskriminasi hanya karena mereka bukan penduduk asli, apalagi sampai dengan menyinggung tentang agama mereka.⁷⁸

Kontroversi yang terjadi atas pengesahan kebijakan CAA ini juga menarik perhatian tokoh-tokoh dari negara lain seperti dalam forum Kuala Lumpur Summit, Mahatir Mohammad yang menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia dan ikut turut serta mengecam Pemerintah India atas pengesahan kebijakan CAA 2019 karena telah mendiskriminasi umat muslim hingga. Selain itu Fachrul Razi yang kala itu menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia juga turut prihatin atas terjadinya kekerasan di India yang disebabkan oleh kebijakan CAA 2019.⁷⁹ Kemudian berdasarkan adanya ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) untuk India, juga membuktikan bahwa India telah melanggar janji untuk melindungi Hak Asasi Masyarakat Muslim di India dengan mengeluarkan kebijakan CAA, karena tidak sesuai dengan tujuan dari konvensi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang

⁷⁸ Trisetyo, G, *Op. Cit.*

⁷⁹ Gatra, S. (2020, February 29). Menteri Agama Prihatin atas Kekerasan di India. *KOMPAS.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/29/08285511/menteri-agama-prihatin-atas-kekerasan-di-india>.

dimaksudkan untuk melindungi seluruh masyarakat internasional dari segala bentuk diskriminasi.⁸⁰

Dravida Munnetra Kazhagam, Liga Musim India, dan lain-lain, turut menyatakan bahwa kebijakan CAA 2019 telah melanggar prinsip sekuler konstitusi India. Dimana seharusnya, pemerintah India menolak adanya tindakan diskriminasi berdasarkan agama dan dapat menjamin seluruh masyarakatnya akan mendapatkan posisi yang setara dimata hukum.⁸¹ Maka berdasarkan prinsip sekuler yang dianutnya, pemerintah India seharusnya tidak boleh membuat suatu kebijakan atau undang-undang dengan mencantumkan persyaratan atas dasar agama di dalam kebijakannya.

Dalam laporan tahunan mengenai kebebasan beragama internasional, Antony Blinken selaku Menteri Luar Negeri AS juga mengatakan bahwa terdapat serangan terhadap tempat ibadah umat minoritas. “India adalah negara demokrasi terbesar dan rumah bagi keragaman agama yang besar di dunia, namun kami telah melihat adanya peningkatan serangan terhadap tempat-tempat ibadah” ucap Blinken.⁸² Selanjutnya, terdapat Rashad Hussain yang merupakan Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional turut menyatakan bahwa beberapa pejabat di India bahkan ikut turut mendukung adanya peningkatan terhadap tempat ibadah.⁸³ Dan juga Matthew Miller yang merupakan juru bicara

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Mayda Rusmianti, N. (2021). *Analisis Konflik Terhadap Penerapan Kebijakan The Citizenship Amendment Bill di India Tahun 2019.*

⁸² Sorongan, T. P. (1970, January 1). Sederet Kontroversi Anti-Islam di India hingga Kata Amerika. *CNBC Indonesia*.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220608091233-4-345202/sederet-kontroversi-anti-islam-di-india-hingga-kata-amerika>

⁸³ *Ibid.*

Departemen Luar Negeri AS ikut mengkhawatirkan CAA 2019, beliau juga mengatakan bahwa menghormati kebebasan beragama dan memberikan hukum yang sama terhadap semua golongan merupakan prinsip demokrasi yang mendasar.⁸⁴

Tidak cukup tokoh muslim dan internasional saja, namun juga terdapat beberapa tokoh Hindu dari berbagai kalangan seperti aktivis, politisi, seniman dan akademisi yang juga ikut turut mengancam dan menolak CAA 2019 karena dinilai bertentangan dengan konstitusi India yang menjunjung prinsip sekularisme serta kesetaraan. Diantara tokoh-tokoh hindu tersebut terdapat Nitish Kumar yang merupakan ketua menteri Bihar, meskipun pada awalnya Nitish Kumar mendukung CAA, namun pada akhirnya beliau sepakat untuk tidak menerapkan NRC di Bihar, yang dimana secara implisit telah menolak kebijakan CAA. Prashant Kishor dan Pavan Verma juga menyatakan ketidaksenangan terhadap partainya yang telah mendukung undang-undang kontroversial tersebut.⁸⁵

2.3.2 Respon Pendukung CAA 2019

Meskipun CAA 2019 ini menuai banyak kontra dengan kontroversialnya, terdapat juga reaksi pro atau dukungan terhadap undang-undang yang penuh kontroversi ini. Mereka para pendukung CAA 2019 ini tegas mengatakan bahwa

⁸⁴ TOI News Desk. (2024c, March 15). "Concerned, closely monitoring": US after CAA implementation in India. *The Times of India*. <https://timesofindia.indiatimes.com/world/us/us-says-it-is-concerned-about-caa-and-closely-monitoring-its-implementation/articleshow/108508148.cms>

⁸⁵ Desk, I. T. W. (2019, December 17). Anti-CAA protests: Posters hunt for missing Nitish Kumar in Patna. *India Today*. <https://www.indiatoday.in/india/story/bihar-caa-protests-nitish-kumar-patna-posters-hunt-missing-1628899-2019-12-17>

undang-undang kewarganegaraan ini tidak bersifat anti-Muslim, dan kelompok Muslim Ahmadiyah serta Rohingya masih bisa mengajukan status kewarganegaraan Indianya melalui proses naturalisasi selama mereka dapat menyertakan dokumen yang sah.⁸⁶ Tn. Harish Salve yang merupakan Mantan Jaksa Agung ikut bersuara bahwa CAA 2019 tidak bersifat anti-Muslim serta menekankan bahwa undang-undang ini fokus membahas masalah penganiayaan agama tertentu di negara teokratis, bukan membahas masalah tata kelola di negara tetangga. Dalam undang-undang ini, para imigran atau kaum minoritas harus memenuhi syarat terlebih dahulu untuk mendapatkan status kewarganegaraan, bukan diberikan secara otomatis. Harish mengatakan bahwa para penentang CAA 2019 sebenarnya tidak memahami betul konteks atau tujuan mengapa India memutuskan untuk mengesahkan CAA 2019.⁸⁷ Ia juga menegaskan bahwa setelah pengesahan CAA 2019 tidak ada warga negara India yang diminta untuk menunjukkan dokumen apapun untuk membuktikan status kewarganegaraannya lagi. Pemerintah Pusat menegaskan bahwa CAA 2019 tidak akan mencabut status kewarganegaraan siapapun dan tidak memiliki hubungan dengan NRC.⁸⁸

Pada tahun 2019, terdapat gerakan massa serta demonstrasi untuk mendukung CAA 2019 di beberapa titik, yakni New Delhi, Mumbai, Nagpur, Bangalore, Dehradun, dll, yang umumnya dipimpin dan digerakkan oleh jaringan

⁸⁶ Ananda, D. (2024). The intersection of Indian citizenship amendment act 2019 and religious persecution. *Discover Global Society*, 2(1). <https://doi.org/10.1007/s44282-024-00108-x>

⁸⁷ NDTV. We aren't fixing Islam's problems": Lawyer Harish Salve Slams CAA Critics. 2024 <https://www.ndtv.com/india-news/we-are-not>

⁸⁸ Indian Express. Indian Express. The New Indian express. 2020. <https://www.newindianexpress.com/nation/2020/Mar/05/caa-is-necessary-not-meant-to-send-muslims-out-of-india-says-top-lawyer-harish-salve-2112705.html>. Accessed 9 Aug 2024. 42. Trump v.

politik dan organisasi yang berafiliasi dengan *Bharatiya Janata Party* (BJP) dan *Rashtriya Swayamsevak Sangh* (RSS). Adapun gerakan tersebut dilakukan untuk mengutuk aksi protes terhadap CAA 2019, gerakan ini juga dilakukan untuk memuji Narendra Modi karena telah mengambil keputusan untuk mengesahkan CAA 2019.⁸⁹

Di kota-kota seperti New Delhi, Mumbai, Bangalore, dan Dehradun, peran penting dimainkan oleh *Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad* (ABVP)—sayap mahasiswa RSS yang menjadi motor utama mobilisasi massa. ABVP secara aktif menggelar kampanye pro-CAA di kampus maupun ruang publik, bekerja sama dengan kader-kader BJP setempat.⁹⁰ Gerakan ini menjadi penyeimbang narasi anti-CAA dengan menekankan bahwa kebijakan tersebut melindungi komunitas minoritas non-Muslim dari negara tetangga. Di Kolkata, dukungan terhadap CAA bahkan dipimpin langsung oleh Jagat Prakash Nadda, Presiden Nasional BJP pada waktu itu. Kehadiran tokoh nasional menegaskan bahwa kampanye pro-CAA tidak hanya digerakkan dari bawah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi politik nasional BJP.⁹¹ Dengan demikian, gerakan massa pro-CAA dapat dipahami sebagai manifestasi dukungan publik yang dipimpin oleh BJP, RSS, ABVP, dan organisasi afiliasinya, serta diperkuat oleh kehadiran elite politik nasional.

⁸⁹ Semarang, U. S. (n.d.). *Demonstrasi Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019-2020* | P2K Universitas STEKOM.

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Demonstrasi_Undang-Undang_Kewarganegaraan_India_2019-2020#cite_note-128

⁹⁰ Staff, F. (2019, December 22). Citizenship Amendment Act protests Updates: Modi's assurance on NRC hollow, says Pinarayi Vijayan; Gujarat BJP to launch campaign to clear "misconceptions." *Firstpost*.

<https://www.firstpost.com/india/citizenship-amendment-act-protests-live-updates-cao-nrc-latest-news-today-bhim-army-chief-violence-protest-in-delhi-jamia-millia-islamia-police-assam-uttar-pradesh-narendra-modi-rally-ramlila-maidan7-7813051.html>

⁹¹ *Ibid.*

Secara keseluruhan, Bab ini menekankan bahwa kebijakan ini lahir dari pemerintah yang didominasi ideologi Hindutva memanfaatkan identitas religius mayoritas demi agenda politik.⁹² Keterkaitan erat BJP dengan organisasi Hindu nasionalis (*Sangh Parivar*) dan penggunaan isu agama sebagai alat politik telah memprioritaskan kepentingan komunitas Hindu dalam kebijakan negara, dengan dampak yang tidak proporsional merugikan minoritas Muslim.⁹³ Akibat mobilisasi identitas tersebut, muncul balasan dari komunitas Muslim yang merasa hak-hak dasar mereka terancam, sehingga ketegangan komunal meningkat.⁹⁴ Berdasarkan konsep HAM, implementasi CAA 2019 berimplikasi pada pelanggaran hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan keamanan kelompok Muslim India. Hal ini akan dibuktikan lebih lanjut dalam Bab III dan Bab IV, namun dalam Bab ini sudah terlihat bahwa prinsip-prinsip HAM internasional seperti nondiskriminasi, hak atas kebebasan beragama, hak atas kewarganegaraan, dan persamaan hak politik menjadi standar untuk menilai kebijakan ini.⁹⁵

⁹² Zakia Amelia, A., & Kartini, E. (2023). Citizenship (Amendment) Act, 2019: The Politicization of Religious Identity in Contemporary India. *Jurnal Politik*, 9(2).

<https://doi.org/10.7454/jp.v2i2.1147>

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Ruiz, D. P. Y. O. S. K. M. U. C. N. K. G. G. M. B. K. a. E. R. P. I. V. (n.d.-b). *MOTION FOR a RESOLUTION on India's Citizenship (Amendment) Act, 2019 | B9-0079/2020 | European Parliament*. © European Union, 2020 - Source: European Parliament. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0079_EN.html#:~:text=deprivation%20of%20citizenship%20on%20the,is%20welcome%E2%80%99%2C%20this%20should%20be